



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

31 Juli – 01 Agustus 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

01 / 08 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Minggu, 31 Juli 2022	+
	MEDIA	https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/31/083500121/seputar-subsidi-bantuan-uang-muka-rumah-sasaran-hingga-besaran-duitnya?page=all	
	JUDUL	Seputar Subsidi Bantuan Uang Muka Rumah, Sasaran hingga Besaran Duitnya	
	NARASUMBER	-	
	RESUME	Biaya uang muka menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan masyarakat ketika hendak membeli hunian melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR). Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mungkin kesulitan untuk memenuhinya. Besaran SBUM bagi masyarakat yang tinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu sebesar Rp 10 juta. Sementara wilayah selain kedua provinsi tersebut, mendapatkan SBUM sebesar Rp 4 juta.	
2.	TANGGAL	Senin, 01 Agustus 2022	+
	MEDIA	https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/01/073318821/tahun-2022-kementerian-pupr-berikan-subsidi-bagi-222586-unit-rumah	
	JUDUL	Tahun 2022, Kementerian PUPR Berikan Subsidi Bagi 222.586 Unit Rumah	
	NARASUMBER	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna	
	RESUME	Pada tahun anggaran 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan subsidi kepada 22.586 unit rumah. Besar dana yang dialokasikan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 yakni melalui FLPP sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan sampai 28 Juli 2022 Kementerian PUPR telah	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

01 / 08 / 2022

| Analisis Pemberitaan Media Online

	menyalurkan KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2 persen. Sementara target BP2BT telah diberikan kepada sebanyak 3.024 unit hunian atau 13,4 persen dari target.	
--	--	--



31 / 07 / 2022

Sumber: kompas.com

Seputar Subsidi Bantuan Uang Muka Rumah, Sasaran hingga Besaran Duitnya

Penulis: Muhdany Yusuf Laksono

Editor: Muhdany Yusuf Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya uang muka menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan masyarakat ketika hendak membeli hunian melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR).

Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mungkin kesulitan untuk memenuhinya.

Kendati begitu, MBR yang hendak membeli hunian melalui KPR Subsidi bisa memanfaatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Lantas, apa itu SBUM?

Terkait SBUM telah tertera dalam Peraturan Menteri PUPR No 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pada Pasal 1 tertulis, SBUM adalah subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR dalam pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka pemilikan rumah.

Lalu di dalam Pasal 8 disebutkan, pemberian SBUM untuk jenis kredit atau pembiayaan pemilikan rumah tapak dan sarusun yang telah siap huni, belum siap huni, ataupun melalui sewa beli.

Subsidi tersebut diberikan kepada kelompok sasaran melalui Bank Pelaksana.

Sebagai pemenuhan kekurangan sebagian atau seluruh uang muka kelompok sasaran kepada pengembang. Hal itu tertera dalam Pasal 9.

SBUM sangat berkaitan dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). MBR bisa mengajukan FLPP sekaligus SBUM.

Artinya memungkinkan untuk mendapatkan dua jenis subsidi saat hendak membeli rumah. Sehingga bisa cukup meringankan MBR.

Sebagaimana tertera dalam Pasal 13, bahwa kelompok sasaran mengajukan permohonan SBUM kepada Bank Pelaksana bersamaan dengan pengajuan pembiayaan pemilikan rumah tapak yang didukung dana FLPP, dengan melampirkan:

- Surat permohonan SBUM; dan
- Surat pengakuan kekurangan bayar uang muka.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, SBUM tidak secara otomatis diperoleh MBR ketika mengajukan FLPP. Karena masyarakat juga perlu mengajukan SBUM.

Seperti dikutip dari di laman Ditjen Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, bahwa



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

31 / 07 / 2022

Sumber: kompas.com

MBR tetap harus mengajukan SBUM bersamaan dengan pengajuan KPR Bersubsidi (FLPP) sepanjang anggarannya masih tersedia.

Adapun terkait besaran SBUM yang diterima masyarakat, pemerintah telah mengatur jumlahnya.

Yakni termaktub di dalam Keputusan Menteri PUPR No. 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Pengasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai,

Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

Besaran SBUM bagi masyarakat yang tinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu sebesar Rp 10 juta.

Sementara wilayah selain kedua provinsi tersebut, mendapatkan SBUM sebesar Rp 4 juta.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/31/083500121/seputar-subsidi-bantuan-uang-muka-rumah-sasaran-hingga-besaran-duitnya?page=all>



01 / 08 / 2022

Sumber: Kompas.com

Tahun 2022, Kementerian PUPR Berikan Subsidi Bagi 222.586 Unit Rumah

Penulis: Masya Famely Ruhlessin
Editor: Masya Famely Ruhlessin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun anggaran 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan subsidi kepada 22.586 unit rumah.

Pemberian subsidi ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

Beberapa fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan yang diberikan oleh Kementerian PUPR antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.

Besar dana yang dialokasikan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 yakni melalui FLPP sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendorong masyarakat khususnya MBR untuk memiliki hunian layak.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi MBR. Kami harap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan

memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki dalam rilis resmi Kementerian PUPR.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan sampai 28 Juli 2022 Kementerian PUPR telah menyalurkan KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2 persen.

Sementara target BP2BT telah diberikan kepada sebanyak 3.024 unit hunian atau 13,4 persen dari target.

“Dengan semangat dari para stakeholders untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, kami sangat optimis target tersebut dapat tercapai,” ucap Herry dalam Webinar Prospek Pembiayaan Properti Di Tengah Ancaman Krisis Global, Jumat (29/7/2022).

Pemberian bantuan kepada MBR ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen atau setara 11 juta rumah tangga.

<https://www.kompas.com/properti/read/2022/08/01/073318821/tahun-2022-kementerian-pupr-berikan-subsidi-bagi-222586-unit-rumah>